

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENAMBANG
BATU DAN PASIR DENGAN PEMILIK LAHAN DESA PINTU
GOBANG KARI DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH**

(Studi di Desa Pintu Gobang Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Syariah (S.Sy)
Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



OLEH:

**ZULHIKMAH
NIM: 105 2200 1106**

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. Amin.

Alhamdulillah, rasa syukur penulis yang tidak terhingga kepada-Nya karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusaha Tambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan/ Tanah di Desa Pintu Gobang Kari ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi)”. Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari pihak-pihak yang telah banyak membantu baik berupa bimbingan, motifasi serta saran dan masukan kepada penulis sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Ayahanda Darmawis dan Ibunda Asniar yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang tak pernah bosan memberikan nasehat dan bimbingan dan

tak pernah lelah untuk mencari biaya demi mencapai keberhasilan serta dengan doa tulus mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA. M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, dan Bapak Kamirunddin, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah.
5. Bapak Drs. H. M. Yunus, sebagai Pembimbing Akademis.
6. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, sebagai dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen dilingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Bapak Drs. M. Nur (Alm) selaku Ketua Jurusan Muamalah lama, yang tidak akan pernah penulis lupakan jasa dan semangat beliau dalam membimbing dan memotivasi penulis.
9. Kakakku Yesi Susanti, S.pdi, abangku Darmaputra, adikku Anjas Asmara dan Atun serta seluruh keluarga besarku yang lain yang telah mendo'akan dan memberikan motifasi untuk penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

10. Teman-temanku, M. Hasril Kamil, S.HI., Ardi Mashur, S.EI., Arman Berkah Cell.Com, Hindy Junaidi, Iwan Saputra, Sony Hendri, Ari Setiyawan, M. Syukri, M. Muslim, dan seluruh teman-teman penulis Muamalah angkatan 2005 yang tak bisa penulis sebut satu per satu, yang selalu memberi support dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran serta kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya, terkandung suatu harapan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan kepada Allah SWT kita serahkan segala sesuatunya. Amin...

Pekanbaru, Januari 2012

ZULHIKMAH
NIM: 10522001106

A B S T R A K

Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Pengusaha Tambang Batu dengan Pemilik Lahan di Desa Pintu Gobang Kari ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi)”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad dan aplikasi kerjasama pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ tanah di Desa Pintu Gobang Kari serta bagaimana analisa menurut perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama ke dua belah pihak tersebut.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara di lapangan, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan, serta dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Dalam menganalisa data-data tersebut penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pengusaha Tambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau perjanjian tidak tertulis. Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini adalah akad *syirkatul-mudharabah* (bagi hasil) yang dilandasi oleh rasa tolong- menolong dan saling percaya. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati di awal.

Menurut syariah Islam bahwa aplikasi dari perjanjian yang mereka laksanakan tidaklah syah (*fasid*) karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai. Dalam istilah fiqh dan ushul fiqh, akad muamalah di atas disebut fasid (rusak), yaitu terjadi kekeliruan dalam hal-hal yang tidak termasuk rukun-rukun akad (*dua pihak yang berakad, objek akad, dan ijab-kabul*).

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB. II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis dan Demografis Desa Pintu Gobang Kari..	13
B. Sejarah Penambang Batu dan Pasir.....	18
C. Pendidikan Masyarakat	19
D. Kehidupan Beragama.....	21
BAB. III TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA	
A. Pengertian Perjanjian Kerjasama.....	23
B. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama	25
C. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama	27
D. Rukun dan Syarat Syirkah	33
E. Pendapat Ulama tentang Perjanjian Kerjasama.....	36

BAB. IV HASIL PENELITIAN

A. Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan.....	41
B. Aplikasi Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan.....	45
C. Analisa Menurut Perspektif Fiqih Muamalah Mengenai Akad Perjanjian Kerjasama Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan.....	49

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT PENULIS

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Orbitrasi / Jarak Dari Pusat Pemerintahan.....	14
Tabel II.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	14
Tabel II.3	Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	15
Tabel II.4	Jumlah Menurut Kelompok Tenaga Kerja.....	16
Tabel II.5	Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	17
Tabel II.6	Sarana Pendidikan Formal/ Informal di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	19
Tabel II.7	Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	20
Tabel II.8	Agama Yang Dianut Penduduk di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	21
Tabel II.9	Sarana Ibadah Masyarakat di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Manusia tidak ada yang sempurna, karenanya manusia selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Apalagi sebagai seorang wirausaha dalam kegiatan usaha memerlukan kerjasama usaha dengan pihak lain, dan dalam memilih mitra kerjasama tentu memilih mitra yang memiliki kelebihan atas kekurangan yang dimiliki diri sendiri, serta memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun mitra kerja sama.¹ Dengan demikian, kerja sama tidak didorong oleh kepentingan sepihak saja, melainkan harus dilandasi oleh kesepakatan yang membawa kemaslahatan kedua pihak.

Moh. Jafar Hafsah, mengatakan bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan (*syirkah*) adalah *win win solution*. Maksudnya, bahwa dalam kerjasama harus menimbulkan kesadaran dan saling menguntungkan kedua pihak. Tentu saja saling menguntungkan bukan berarti kedua belah pihak yang kerjasama tersebut harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sama serta memperoleh keuntungan yang sama besar. Akan tetapi, kedua belah pihak memberi kontribusi atau

¹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, Alih Bahasa: Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), h. 68.

peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai atau diderita kedua pihak bersifat proporsional, artinya sesuatu dengan peran dan kekuatan masing-masing.² Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12:

.....فَأَنْ كُنْتُمْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ.....إِلَخ

Artinya: "...Tetapi jika kamu (saudara-saudara seibu) itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga...."³
(Q.S An-Nisa':12)

Upaya memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan terhadap manusia. Tanpa hubungan dengan orang lain, tidak mungkin berbagai kebutuhan hidup dapat terpenuhi. Terkait dengan hal ini, maka perlu diciptakan suasana yang baik terhadap manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan akad kerjasama (syirkah) dengan pihak lain.

Syirkah dari segi bidang usahanya ada yang hanya menjalankan satu bidang usaha saja, misalnya di bidang konsumsi, bidang kredit, bidang produksi. Ini disebut koperasi bidang usaha tunggal (single purpose). Ada pula koperasi yang melaksanakan usahanya dalam berbagai bidang, disebut koperasi bidang usaha (multi purpose), misalnya pembelian dan penjualan.

² Mohammad Jaffar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), Cet. 1., h. 12.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, 1990), h. 117.

Menurut Hendi, yang dijadikannya dasar hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه : رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال
الله تعالى انا ثا لث الشاركين مالم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت
من بينهما

Artinya: Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW , Sesungguhnya Allah SWT berfirman; Aku adalah yang ketiga pada dua orang bersekutu selama salah satu seseorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, aku akan keluar dari persekutuan tersebut. Apabila salah seorang mengkhianatinya. (H.R. Abu Daud, Al-Hakim dan hadits ini shahih sanadnya)

Dari penjelasan hadits di atas, dapat dipahami hukum syirkah pada dasarnya boleh dan menjadi haram apabila salah satunya mengkhianati perjanjian syirkah tersebut. Memang ada yang membedakan jenis syirkah dapat berbentuk *syarikatul amlak* dan *syarikatul 'uqud*. Syarikatul amlak (kerjasama hak milik) adalah syarikah terhadap zat barang, seperti syarikah terhadap barang yang diwarisi oleh dua orang atau yang dibeli oleh keduanya. Sedangkan syarikatul 'uqud adalah kerjasama berdasarkan perjanjian (aqad) untuk mengembangkan hak milik seseorang. Akan tetapi yang secara umum lebih dipahami dan diterapkan adalah sejenis yang kedua, dimana jika dipilah-pilah ada lima jenis⁴. Yaitu syarikah *mudharabah*, *'inan*, *abdan*, *wujud*, dan *wufawadhah*.

⁴ Nurrahman Blog, *Macam-macam Srirkah*, (2010: Google.co.id)

Berdasarkan dari penjelasan hadits di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang syirkah antara penambang baru dan pasir dengan pemilik tanah di Desa Pintu Gobang Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil obeservasi dan wawancara penulis dengan penambang batu dan pasir, bahwa penambang tersebut melakukan kerjasama (syirkah) dengan pemilik tanah di Desa Pintu Gobang Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi sejak dari tahun 2001 sampai saat ini.⁵

Bentuk syirkah yang mereka sepakati tanpa adanya ikatan perjanjian tertulis, yang mana menurut penulis sangat bertentangan dengan tuntutan syariat seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....إِلخ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah⁶ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”.⁷ (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menegaskan perlunya manusia untuk mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Quran, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten

⁵ Darmadi, Wawancara dengan Penambang Batu dan Pasir, (Pintu Gobang Kari, tanggal 26 Maret 2011).

⁶ Bermuamalah yaitu seperti berjual beli, berutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran...., Op.cit.* h. 70.

dan berkesinambungan, dikategorikan Allah sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Menurut analisa Husaini, ayat ini memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.⁸ Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha.

Menurut Ahmad, mekanisme syirkah adalah transaksi atau akad antara dua orang atau lebih, dimana mereka saling bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dan mendatangkan keuntungan (profit).⁹ Menurut jumhur ulama, rukun syirkah ada tiga, yaitu: (1) sighat/ akad (ijab dan qabul), (2) pihak yang berakad baik membawa modal (syariku al-mal) ataupun membawa keahlian dan tenaga (syariku al-badn), dan (3) usaha. Sedangkah syarat sah dan tidaknya akad syirkah amat ditentukan oleh sesuatu yang ditransaksikan, yaitu sesuatu yang bisa dan boleh (halal) ditransaksikan.

⁸ Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, data yang diakses dari internet <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/4172/36/lang>

⁹ Ahmad Naufa, <http://ahmadnaufa.wordpress.com/2010/04/16/konsep-syirkah/>

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penambang batu dan pasir dengan pemilik tanah di desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis menemukan gejala-gejala dalam penelitian ini, yaitu; tidak adanya ikatan perjanjian tertulis antara penambang batu dan pasir dengan pemilik tanah di Desa Pintu Gobang Kari, dan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penambang batu dan pasir, bahwa beliau telah mengadakan kerjasama dengan pemilik tanah di desa Pintu Gobang Kari sejak tahun 2001 sampai saat ini, tanpa ikatan perjanjian yang tertulis. Sejak tahun 2001 sampai sekarang penambang batu dan pasir tidak pernah memakai tenaga kerja yang tetap, sehingga jika dilihat dari kacamata usaha, kegiatan tersebut tidak berkembang.

Belum lagi dalam pembagian bagi hasil, yang menurut penulis tidak adil. Sebagaimana pengakuan Bapak selaku pemilik usaha tambang batu dan pasir bahwa beliau mengadakan kerjasama ini dengan sistem bagi hasil 60% : 40%. Artinya pengusaha tambang batu dan pasir memberi 60% dari hasil tersebut kepada pemilik tanah berdasarkan hasil tambang per-hari, yang seharusnya ini dikeluarkan setelah biaya-biaya per-hari seperti: makanan dan minuman pekerja, perbaikan peralatan, dan biaya lain yang tidak terduga dikeluarkan terlebih dahulu.

Dengan bertitik tolak pada pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan kerjasama yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengusaha Tambang Batu Dan Pasir dan Pemilik Tanah Tepian di Desa Pintu Gobang Kari ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah(Studi di Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi).**

B. Batasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih valid dan mendalam tentang inti permasalahan maka pembahasan dalam tulisan ini lebih dipokuskan kepada pelaksanaan perjanjian kerja sama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah ditinjau menurut perspektif Fiqih Muamalah (Studi di Desa Pintu Gobang Kari Kec.Kuantan Tengah)

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah ditetapkan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah?
- b. Bagaimana aplikasi akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah?
- c. Bagaimana analisa menurut perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama ke dua belah pihak tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui akad kerjasama dan aplikasinya yang dilakukan antara pengusaha batu dan pasir dengan pemilik tanah.
- b. Untuk mengetahui aplikasi akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah.
- c. Untuk menganalisa menurut perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama kedua belah pihak tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah.
- b. Dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problematika dalam kerjasama pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah di Desa Pintu Gobang Kari Taluk Kuantan.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang mekanisme kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah dalam meningkatkan pendapatan kedua belah pihak.

E. Metode Penelitian Hukum Islam

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha tambang batu dan pasir yang berlokasi di lahan pemilik tanah Desa Pintu Gobang Kari

Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing. Lokasi ini dipilih karena pengusaha batu dan pasir melakukan usahanya di tanah milik warga desa Pintu Gobang Kari yang diharapkan dapat memberikan data-data yang lebih valid tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah dalam perspektif fiqh muamalah.

2. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pengusaha tambang batu dan pasir, dan pemilik lahan/ tanah desa Pintu Gobang Kari. Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ tanah ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

3. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik usaha tambang batu/ pasir dan pegawai sebanyak 25 orang dan pemilik tanah/ lahan sebanyak 5 orang. Dalam pengambilan sampel untuk pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ tanah beserta pegawainya yang berjumlah 30. Penulis menggunakan total purposive sampling yaitu seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlahnya sedikit.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang didapat di lapangan dari responden (pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik tanah/ lahan).
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrument:

- a. Observasi yaitu melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran data yang tepat mengenai subjek penelitian, adapun bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung.
- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada subjek penelitian. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara terbuka dimana informan tidak merasa dirinya sedang diwawancarai, sehingga informasi yang didapat benar-benar murni tanpa rekayasa.
- c. Melakukan kajian kepustakaan.

6. Analisa Data

Analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data dengan

mengklarifikasikan data-data berdasarkan persamaan jenis dari data tersebut, kemudian diuraikan antara satu dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran umum yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

- a. Deduktif yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan menyimpulkan fakta-fakta secara khusus dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan kepada subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab diuraikan kepada beberapa unit dan sub unit, yang mana keseluruhan uraian tersebut mempunyai hubungan dan saling berkaitan satu sama lainnya.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Terdiri dari letak dan geografis Desa Pintu Gobang Kari, sejarah penambang batu dan pasir, pendidikan masyarakat dan kehidupan beragama.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA DALAM ISLAM

Terdiri dari pengertian perjanjian kerjasama dan dasar hukumnya, bentuk-bentuk perjanjian kerjasama, rukun dan syarat kerjasama serta pendapat ulama tentang perjanjian kerjasama.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Terdiri dari akad dan aplikasi kerjasama penambang batu dan pasir serta analisa menurut perspektif fiqh muamalah mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama kedua belah pihak tersebut.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis Desa Pintu Gobang Kari

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Pintu Gobang Kari merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas daerah 8500 Ha, yang terdiri dari 3 RW dan 10 RT. Sedangkan batas-batas wilayah Pintu Gobang Kari adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Koto Kari
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pulau Godang Kari
3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa/ Kelurahan Teluk Kuantan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulau Banjar Kari

Desa Pintu Gobang Kari keadaannya relatif sedang tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Daerah ini merupakan daerah yang strategis, dan jenis tanahnya pasir. Jarak dari pusat propinsi sekitar 168 KM.¹ untuk lebih jelasnya tentang jarak yang ditempuh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹ Mukhdar (KAUR Desa), *wawancara*, 17 Oktober 2011.

TABEL II.1**ORBITRASI / JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN**

NO.	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1	Jarak dari Desa ke Ibu Kota Kecamatan	2 KM
2	Jarak dari Desa ke pusat Kaupaten	4 KM
3	Jarak dari Desa ke pusat Propinsi	168 KM

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

2. Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk

Keadaan pertumbuhan jumlah penduduk di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah dapat dirincikan sebagai berikut:

TABEL II.2**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**

NO.	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	Laki-Laki	742 Jiwa
2	Perempuan	900 Jiwa
Jumlah		1642 Jiwa

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah menurut jenis kelamin yaitu 742 jiwa adalah terdiri dari laki-laki dan 900 Jiwa terdiri dari perempuan, sehingga total jumlah 1642 jiwa. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) yaitu 400 kepala keluarga.

Apabila dilihat dari segi usia atau umur, maka jumlah masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TABEL II.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO.	GOLONGAN UMUR	JUMLAH
1	0-5 Tahun	110 Jiwa
2	6-12 Tahun	183 Jiwa
3	13-18 Tahun	264 Jiwa
4	19-24 Tahun	420 Jiwa
5	25-50 Tahun	557 Jiwa
6	51 Tahun ke atas	105 Jiwa
Jumlah		1642 Jiwa

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 0-5 tahun berjumlah 110 jiwa, 6-12 tahun berjumlah 183 jiwa, 13-18 tahun berjumlah 264 jiwa, 19-24 tahun berjumlah 420 jiwa, 25-50 tahun berjumlah 557 jiwa, dan 50 ke atas berjumlah 105 jiwa.

Adapun jumlah penduduk menurut kelompok tenaga kerja berjumlah sebagai berikut:

TABEL II.4
JUMLAH MENURUT KELOMPOK TENAGA KERJA

NO.	USIA / UMUR TENAGA KERJA	JUMLAH
1	19-24 Tahun	420 Jiwa
2	25-50 Tahun	557 Jiwa
Jumlah		977 Jiwa

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Berdasarkan tabel di atas usia tenaga kerja masyarakat Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah adalah 19-24 tahun berjumlah 420 jiwa, sedangkan usianya 25-50 tahun berjumlah 557 jiwa.

3. Sosial Budaya

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebanyakan masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah bekerja sebagai petani.² Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor kepala Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

² Basri wahid (KAUR Pemerintahan), *wawancara*, 17 Oktober 2011

TABEL II.5
MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA PINTU GOBANG
KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani	457 Jiwa
2	Pedagang	75 Jiwa
3	PNS	35 Jiwa
4	Penambang Batu dan Pasir	129 Jiwa
5	Swasta	163 Jiwa
6	Wiraswata	87 Jiwa
7	Tukang kayu	25 Jiwa
8	Jasa	6 Jiwa
Jumlah		977 Jiwa

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah adalah petani berjumlah 457 jiwa, pedagang berjumlah 75 jiwa, PNS berjumlah 35 jiwa, Penambang Batu dan Pasir berjumlah 129 jiwa, swasta berjumlah 163 jiwa, wiraswasta berjumlah 87 jiwa, tukang kayu berjumlah 25 jiwa, jasa berjumlah 6 jiwa. Maka dapat diketahui bahwa jumlah mayoritas penduduk desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai petani.

B. Sejarah Penambang Batu dan Pasir

Keadaan ekonomi masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah sangat bermacam-macam dan relatif normal. Karena mereka mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, secara umum masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah bekerja sebagai petani. Namun, seiring perkembangan zaman dan tuntutan akan kebutuhan hidup, sehingga sebagian masyarakat merasa perlu untuk melakukan sebuah usaha guna mantapnya kehidupan mereka. Di samping itu, keberadaan Desa Pintu Gobang Kari sangat strategis dan mempunyai banyak sumberdaya alam dan hasil bumi yang bisa dimanfaatkan. Salah satu dari hasil bumi yang paling bermanfaat bagi masyarakat adalah batu dan pasir, di samping tingginya kebutuhan akan batu dan pasir untuk pembangunan secara umum kota Taluk Kuantan, hal itu bermula semenjak Taluk Kuantan mekar menjadi sebuah Kabupaten.

Menurut penuturan Aprinedi,³ kegiatan tersebut mulai marak digemari oleh sebagian masyarakat desa Pintu Gobang Kari kira-kira pada tahun 1999, yaitu semenjak Taluk Kuantan dimekarkan menjadi Kabupaten. Kegiatan tersebut terus dikembangkan oleh masyarakat hingga sekarang, bahkan itu telah menjadi sebuah mata pencaharian sehari-hari.

³ Aprinedi, (Tokoh Masyarakat), *wawancara*, 20 Oktober 2011 jam 20.00 Wib.

C. Pendidikan Masyarakat

Pendidikan mempunyai makna sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.6

**SARANA PENDIDIKAN FORMAL / INFORMAL DI DESA PINTU
GOBANG KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH**

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TK	1
2	SD	1
3	MDA	2
4	SLTP	1

(Sumber dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel di atas dan juga hasil wawancara dari aparatur desa Pintu Gobang Kari mengatakan bahwa sarana pendidikan formal dan informal di desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah adalah TK yang

berjumlah 1, SD yang berjumlah 1, MDA yang berjumlah 2, dan SLTP yang berjumlah 1. Akan tetapi ada juga anak-anak yang menuntut ilmu keluar daerah.

Dengan demikian penduduk desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL II.7
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DI DESA PINTU GOBANG
KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum Sekolah	227 Jiwa
2	Tamat SD	235 Jiwa
3	SLTP / Sederajat	240 Jiwa
4	SMA / Sederajat	264 Jiwa
5	Akademi / PT	86 Jiwa
6	Belum Tamat	590 Jiwa

(Sumber data dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang belum bersekolah berjumlah 227 jiwa, tamat SD berjumlah 235 jiwa, tamat SLTP/ sederajat berjumlah 240 jiwa, tamat SMU/ sederajat berjumlah 264

jiwa, perguruan tinggi berjumlah 86 jiwa, yang belum tamat berjumlah 590 jiwa.

D. Kehidupan Beragama

Penduduk desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah mayoritas agama yang dianutnya adalah agama Islam, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL II.8
AGAMA YANG DIANUT PENDUDUK DI DESA PINTU GOBANG
KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	1642 Jiwa
2	Kristen	-
3	Hindu	-

(Sumber data dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat yang menganut agama Islam adalah mayoritas yakni berjumlah 1642 jiwa. Sedangkan sarana tempat ibadah masyarakat desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II.9
SARANA IBADAH MASYARAKAT DI DESA PINTU GOBANG
KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	2
2	Mushalah	5
3	Kuil	-
4	Gereja	-

(Sumber data dari kantor kepala desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, tahun 2010)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana ibadah berupa masjid berjumlah 2 buah, mushallah berjumlah 5 buah. Bagi masyarakat yang beragama Islam di desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang menggunakan sarana ibadah tidak hanya untuk tempat shalat saja, akan tetapi juga digunakan sebagai tempat wirid ibu-ibu, tempat belajar seni al-Qur'an untuk anak-anak dan remaja, dan peringatan keagamaan lainnya.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA (SYARIKAH)

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Secara bahasa syirkah atau musyarakah berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fikih syirkah adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.¹ Syirkah adalah perseroan dalam Islam yang mendasarkan pola operasionalnya pada prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil².

Perseroan (syirkah) dari segi bahasa bermakna penggabungan dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Menurut definisi syariah, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.³

Menurut arti asli bahasa arab, syirkah berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Syarikah atau syirkah secara termonologis perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan tasharruf (pendayagunaan harta).

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Edisi 1-3, h. 125.

² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), Cetakan ke-2, h. 276.

³ Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham al-Iqtishadi*, (Beirut: Darul Ummah, 1990), Cetakan ke-4, h. 146.

Menurut Sayyid Sabiq *syirkah* adalah⁴

عقد بين المتشاركين في رأس المال والرأب

Artinya: Perjanjian antara dua pihak yang bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.

Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib *syirkah* adalah *Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui)*. Sedangkan menurut Syihab al-Din al-Qlyubi wa Umaira yang dimaksud *syirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

Menurut Chairuman⁵ *syirkah* pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain kerjasama ini mencari keuntungan.

Meskipun rumusan yang dikemukakan para ulama tersebut redaksional berbeda, namun dapat dipahami intinya bahwa *syirkah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau beberapa pihak, baik mengenai modal ataupun pekerjaan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bersama.

⁴ Fiqh al-Sunnah, hlm. 294

⁵ Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

B. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Akad syirkah ini mendapatkan landasan syariahnya dari al-Qur'an, al-Hadis dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”⁶ (Q.S. Al Baqoroh: 282)

Allah Subhanallahu Wa Ta'ala menegaskan dalam ayat ini perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

b. Firman Allah dalam surat Shaad: 24.

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamsil Cipta Media, 2006), h. 48.

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu benar-benar berbuat zalim kepada sebagian lainnya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh”.⁷ (**Q.S. Shaad: 24**)

Ayat ini mencela perilaku orang-orang yang berkongsi atau berserikat dalam berdagang dengan menzalimi sebagian dari mitra mereka. Kedua ayat al-Qur'an ini jelas menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yang terdahulu dan telah dipraktekkan.

2. As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

انا ثالث الشاركين ما لم يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

Artinya: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya” (**HR. Abu Dawud dan Hakim**).⁸

Arti hadits ini adalah bahwa Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepemilikanNya, penjagaanNya dan bantuanNya. Allah akan memberikan bantuan dalam kemitraan ini dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan sehingga perniagaan itu merugi. Di samping itu masih banyak hadis yang lain yang menceritakan bahwa para sahabat telah mempraktekkan syirkah ini sementara Rasulullah

⁷ *Ibid*, h. 454.

⁸ Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 127.

SAW tidak pernah melarang mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasulullah telah memberikan ketetapan kepada mereka.

3. Ijma'

*Ijma'*⁹ menurut pakar *ushul fikih* merupakan salah satu prinsip dari *syariat* Islam. *Ijma'* adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus seluruh ulama (*mujtahid*) di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Dalam konteks *musyarakah*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, mengatakan: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.

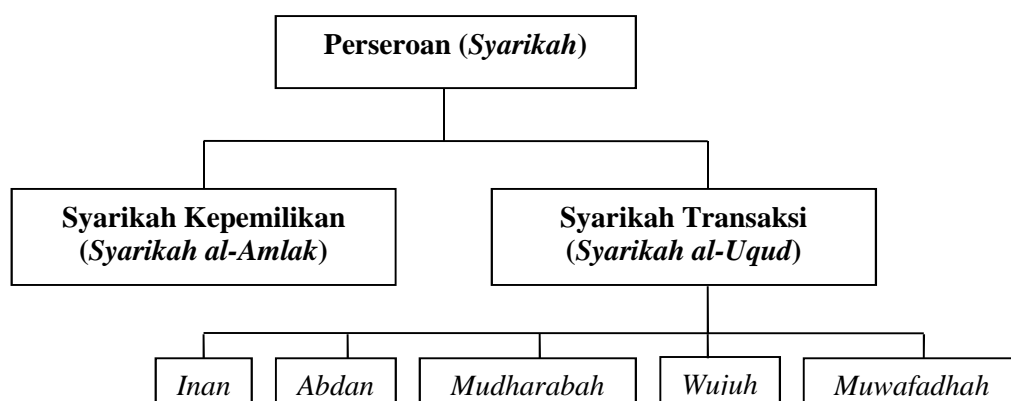
C. Bentuk-bentuk Perjanjian Kerjasama

Syarikah dalam terminology Fikih Islam dibagi dalam dua jenis: Syirkah al-Milk (syirkah amlak atau syirkah kepemilikan), yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property atau zat barang, seperti kerjasama dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang, atau menjadi pembelian mereka, atau hibah yang diberikan oleh seseorang untuk mereka, maupun yang lain; dan Syirkah al-'Aqdu (syirkah 'uqud atau syirkah transaksi), yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama,

⁹ Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 122.

atau usaha komersial bersama, karena yang menjadi obyeknya adalah pengembangan hak milik.¹⁰ Syirkah al-‘Aqdu/ transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam, yaitu: *inan*, *abdan*, *mudharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.¹¹ Berikut penjelasannya di bawah ini:

Gambar 1. Jenis-jenis Syarikah



1. Syarikah ‘*Inan*.

Syarikah ‘*Inan* adalah syarikah di antara dua orang atau lebih; masing-masing pihak berinvestasi dan secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan ditanggung bersama. Dengan demikian, setiap pihak dalam syarikah memberikan kontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja. Seluruh pihak akan berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Seberapa banyak kontribusi seluruh pihak dalam odal dan kerja dapat berbeda-beda sesuai kesepakatan mereka. Seluruh persero memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam transaksi

¹⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 147-148.

¹¹ Pembahasan ini bisa juga dilihat dalam buku karangan DR. Sholeh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhashu al-Fiqhiyyu*, (Riyadh: Kerajaan Saudi Arabiyah, 1423 H), Cetakan ke-1, jild 2, h. 123-125.

usaha yang dijalankan.¹² Masing-masing persero, misalnya, dapat melakukan transaksi jual-beli, menentukan harga dan lainnya tanpa ada perbedaan.

Dalam syarikah ini tidak diperbolehkan seorang persero mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk menggantikan posisinya dalam syarikah. Sebab, syarikah ini mengikatkan transaksinya pada seluruh pesero sebagai pengelola. Keseluruhan pesero harus terlibat secara langsung sebagaimana deksripsi dan pembagian kerja yang telah disepakati bersama. Namun, dalam skala usaha yang besar, diperbolehkan menggaji seseorang sebagai pekerja syarikah dan bukan sebagai wakil salah seorang pesero.¹³

Menurut M. Syafi'i Antonio¹⁴, syarikah semacam ini diperbolehkan berdasarkan as-Sunnah dan Ijma' Sahabat; sejak masa Nabi saw. hingga masa Sahabat banyak kalangan yang melakukannya, namun dibiarkan saja oleh Nabi saw. Dalam hal ini, jenis syarikah ini. Mazhab Hanafi, Mazhab Hanbali, Ibnu Qudamah, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i sepakat bahwa transaksi ini dapat dilakukan meskipun mereka berbeda pendapat dalam segi proporsi pembagian keuntungan.

2. Syarikah 'Abdan

¹² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op.cit*, h. 281-282.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 188-189.

Syarikah 'Abdan yaitu syarikah antara dua orang atau lebih dengan masing-masing pihak hanya memperserokan badan mereka tanpa disertai investasi modal.¹⁵ Dalam syarikah ini masing-masing pesero memberikan kontribusi berupa tenaga mereka baik pemikiran maupun fisik dan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Profesi dan keahlian ini bisa sama dan bisa juga berbeda. Misalnya satu pihak tukang cukur dan pihak lainnya tukang jahit. Mereka menyewa satu tempat untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di antara mereka. Syarikah ini dinamakan juga dengan syarikah a'mal atau syarikah sana'i.¹⁶

Hukum syarikah ini adalah mubah berdasarkan ketetapan Rasulullah saw. dalam beberapa haditsnya. Dari Abdullah bin Mas'ud, mengatakan:

Saya, Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash pernah bekerjasama dalam apa yang kami peroleh dalam Perang Badar. Saad membawa dua orang tawanan perang, sementara saya dan Ammar tidak membawa apa-apa.¹⁷ **(H.R Abu Dawud, An-Nasaai dan Ibnu Majah)**

3. Syarikah *Mudharabah*

Syarikah Mudharabah juga disebut dengan *qiradh*,¹⁸ yaitu syarikah yang terbentuk antara dua pihak; pihak pertama menyediakan keseluruhan modal (*shahib al-mal*) dan pihak lainnya menjadi pengelola. Pihak *shahib*

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 150.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Loc.cit*.

¹⁷ Abu Dawud (3388) [3/ 440], An-Nasaai (3947) [4/ 67], Ibnu Majah (2288) [3/ 79]

¹⁸ Kerjasama dalam bentuk Mudharabah dinamakan oleh Ulama Irak, serta disebut Qiradh oleh Ulama Hijaz. Lihat pembahasan ini dalam kitab karangan Hasan Ayyub, *Fiqhu al-Mu'amalati al-Maaliati fi al-Islami*, (Mesir: Daar as-Salam, 2006), Cet. 3., h. 230-231.

al-mal bersepakat untuk menyerahkan modalnya kepada pengelola untuk dikelola dalam bentuk syarikah. Modal yang diserahkan untuk dikelola harus jelas nilainya. Setelah modal diserahkan, pihak pemodal tidak diperbolehkan ikut melakukan pengelolaan secara mutlak, sebab prinsip *mudharabah* adalah menyerahkan modal secara penuh kepada pihak pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai dengan proporsi yang disepakati dan dituangkan dalam kontrak. Adapun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahib al-mal* selama bukan akibat kelalaian pengelola.¹⁹

4. Syirkah Wujuh

Terdapat dua bentuk syarikah wujuh yang dibenarkan dalam Islam. *Pertama:* syarikah antara dua orang pengelola atau lebih yang modalnya berasal dari pihak di luar kedua pengelola tersebut. Syirkah ini masih tergolong *syarikah mudharabah*. Bedanya, yang bertindak sebagai *mudharib* berjumlah dua orang atau lebih. Salah satu ciri dari syarikah wujuh ini adalah adanya perbedaan pembagian keuntungan di antara pengelola karena perbedaan kedudukan atau kontribusi kerja salah seorang di antara mereka.²⁰

Kedua: syarikah antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik. Mereka melakukan syarikah dengan modal yang berasal dari pembelian secara kredit dan kemudian menjualnya secara tunai. Kepercayaan inilah yang menyebabkan mereka memiliki andil dalam syarikah. Yang dimaksud dengan kepercayaan di

¹⁹ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op.cit*, h. 285.

²⁰ *Ibid*, h. 287.

sini adalah kredibilitas secara finansial untuk melunasi pembelian kredit yang dilakukan.²¹

Dua model syarikah wujud ini diperbolehkan. Sebab, pada model pertama pada dasarnya perseoran ini termasuk kategori *mudharabah* yang telah diperbolehkan sebagaimana pembahasan di atas. Pada model kedua, modal yang mereka dapatkan dari pembelian secara kredit termasuk dalam kategori *syarikah 'abdan* yang juga telah dinyatakan kebolehan. Oleh karena itu, secara syariah syarikah wujud ini dapat dilakukan di dalam sistem ekonomi Islam.

5. Syirkah *Mufawadhah*

Syarikah *Mufawadhah* adalah syarikah antara dua persero atau lebih sebagai gabungan semua bentuk syarikah yang telah disebutkan di atas.²² Contohnya adalah seseorang memberikan modalnya kepada dua orang insinyur untuk mengadakan syarikah dengan tujuan membangun beberapa rumah untuk dijual. Kemudian kedua insinyur tersebut sepakat untuk memberikan harta milik mereka. Selama pembangunan rumah, keduanya mendapatkan barang secara kredit. Dalam syarikah semacam ini terjadi penggabungan *syirkah 'abdan*, *mudharabah*, *'inan* dan *wujud*. Syarikah *'inan* tampak pada pengumpulan modal keduanya secara bersama-sama. Dilihat dari segi diperolehnya modal dari pihak lain untuk dikelola, hal ini tergolong syarikah *mudharabah*. Kerjasama mereka untuk

²¹ *Ibid.*

²² Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.cit*, h. 156.

mengelola barang yang menjadi hasil pembelian kredit adalah syarikah *wujuh*.

Secara syariah, syarikah *mufawadhah* adalah sah karena bersifat penggabungan jenis-jenis syarikah yang telah diperbolehkan. Jika masing-masing syarikah yang digabungkan tersebut hukumnya sah maka hukum gabungan syarikah juga sah.²³

Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya, syirkah Muwafadhah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan persyaratan sebagai berikut:²⁴

- a. Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
- b. Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak-anak yang belum dewasa belum bisa menjadi anggota persyarikatan.
- c. Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyariat dengan non-muslim.
- d. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama syirkah (kerjasama).

D. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah masih diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu: Ijab dan Qabul. Sebab Ijab

²³ *Ibid*, h. 157.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), Ed. 1., Cet. 2., h. 164.

Qabul (akad) menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti 2 orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti dalam akad jual beli.

1. Syarat-syarat umum syirkah:²⁵

- a. Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilkan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataan, sering kali satu patner mewakili perusahaan untuk melakukan dealing dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan gesit.
- b. Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing patner harus mengetahui saham keuntungannya seperti 10% atau 20% misalnya.
- c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner.

2. Syarat-syarat khusus

- a. Modal yang disetor harus berupa barang yang dihadirkan. Tidak diperbolehkan modal masih berupah utang atau uang yang tidak dapat dihadirkan ketika akad atau beli. Tidak disyaratkan modal yang disetor oleh para patner itu dicampur satu sama lain. Karena syirkah ini dapat diwujudkan dengan akad dan bukan dengan modal.
- b. Modal harus berupa uang kontan. Tidak diperbolehkan modal dalam bentuk harta yang tidak bergerak atau barang. Karena barang-barang ini tidak dapat dijadikan ukuran sehingga akan menimbulkan

²⁵ Syafe'i Rahmat, *Loc.cit.*

persengketaan di kemudian hari karena keuntungan yang dihasilkannya juga menjadi tidak jelas proporsinya dengan modal yang disetor akibat sulitnya dinilai.

Menurut Hanafiyah, syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah dibagi menjadi empat yaitu ²⁶:

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: Berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya.
- b. Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipeuhi yaitu : Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam *mufawadhah* disyaratkan: Modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
- d. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

²⁶ *Ibid*

E. Pendapat Ulama tentang Perjanjian Kerjasama.

Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.²⁷ Sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Saling bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat baik dan taqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan”.²⁸ (Q.S. al-Maidah: 2)

Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri. Kerjasama dalam pertanian dapat berlaku antara pemilik lahan pertanian dengan pekerja tani yang disebut *muzara'ah* atau antara pemilik pepohonan dengan pekerja perawat pepohonan tersebut yang disebut *musaaqah*.

Kerjasama dalam usaha perdagangan dan industri dapat terjadi antara pemilik modal dan pengusaha, yang satu menyerahkan modal dan yang lain menyediakan tenaga yang disebut *mudharabah*, atau antara sesama pekerja yang bekerja untuk mendapatkan upah bersama yang disebut syarikat *abdan*, atau antara sesama pemilik modal untuk berusaha bersama yang disebut syarikat *'inan*, atau antara sesama pemilik modal yang saling menguasai

²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, Edisi pertama, h. 239.

²⁸ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 106.

kepada sebagian di antaranya untuk berusaha yang disebut syarikah *mufawadhah*.²⁹ Inilah beberapa bentuk kerjasama dalam muamalah yang populer dalam fiqih.

Berdasarkan pandangan umum di atas, kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *syirkatul-mudharabah*, yaitu antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengusaha atau pekerja.

Al-Mudharabah diambil dari kata *add-dharbu fil-ardhi* yang artinya melakukan perjalanan di muka bumi untuk melakukan perniagaan.³⁰ Mudharabah disebut juga *qiradh* yang arti asalnya saling mengutang.³¹ Mudharabah mengandung arti “kerjasama dua pihak yang satu di antaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi di antara keduanya menurut kesepakatan”. Allah berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.³² (Q.S. al-Muzzammil: 20)

Maksudnya, mencari rezeki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi mudharabah dalam syara’ adalah menyerahkan sejumlah

²⁹ *Ibid*, h. 240.

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. 1, h. 468.

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 244.

³² Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 575.

harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berniaga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.

Muamalah dalam bentuk mudharabah disepakati kebolehan. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman Nabi saw yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau menjadi Nabi. Kebolehan ini juga diriwayatkan dari Umar r.a, Utsman r.a, Ali r.a, Ibnu Mas'ud r.a dan lainnya, serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.³³

Hakikat dari muamalah dalam mudharabah itu adalah bahwa dari segi modal yang diserahkan itu ia adalah titipan yang mesti dijaga oleh pengusaha. Dari segi kerja, pengusaha berkedudukan sebagai wakil dari pemilik modal, maka berlaku padanya ketentuan tentang perwakilan, sedangkan dari segi keuntungan yang diperoleh, ia adalah harta serikat antara pemilik modal dengan pengusaha.

Ibnu Mundzir berkata, “para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi tidak sah.”³⁴

³³ *Ibid*, h. 245.

³⁴ Saleh Al-Fauzan, *Op.cit*, h. 468.

Dalam kerjasama mudharabah terdapat empat unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu akad mudharabah:³⁵

- a. Pemilik modal yang disebut juga *rabbul mal* dan pengusaha atau disebut juga yang menjalankan mudharabah atau *mudharib* sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Keduanya harus telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perjanjian, yaitu telah dewasa, sehat akal, dan bertindak dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan pengusaha cakap dan mampu bekerja sesuai dengan bidangnya.
- b. Yang merupakan objek kerjasama yaitu modal. Syaratnya harus dalam bentuk uang atau barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, milik sempurna dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsung akad.
- c. Keuntungan atau laba. Keuntungan dibagi sesuai yang disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya ialah bahwa yang akan diteima oleh pekerja atau pemilik modal bukan dalam sesuatu yang pasti.

Menurut pendapat sebagian ulama, modal yang diterima oleh mudharib di samping diperdagangkannya sendiri, dapat pula diserahkannya kepada orang lain untuk di-mudharabah-kan, asalkan yang demikian berada dalam tanggungannya.

Kerjasama mudharabah berakhir bila syarat yang ditentukan sudah tidak terpenuhi, atau pekerja tidak lagi mampu melanjutkan usahanya atau

³⁵ Amir Syarifuddin, *Op.cit*, h. 246.

salah satu pihak meninggal dunia. Hasil usaha diperhitungkan sampai terputusnya hubungan kerja.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah *syarikah mudharabah* (bagi hasil), yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden¹, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pengusaha Tambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.

Sementara itu, dari hasil wawanca penulis² dengan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang atau 79% menyatakan kerjasama dalam usaha tambang batu dan pasir ini sudah bejalan \pm 11 tahun yaitu sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sedangkan menurut 3 Orang atau 7% renponden

¹ Wawancara dengan Pemilik Lahan, tanggal 20 Oktober 2011 jam 16.15 Wib.

² Wawancara tanggal 02 November 2011 di Desa Pintu Gobang Kari jam 10.00 Wib.

mengatakan usaha ini telah berjalan selama 8 tahun, dan menurut 6 orang yang lain atau 14% mengatakan usaha ini telah berjalan selama 6 tahun, hal ini dikarenakan responden tersebut baru bekerja selama ± 6 tahun.

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah kerjasama adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara³, alasan responden mengadakan perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik lahan.

Walaupun perjanjian kerjasama (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi-wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik lahan tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakasi pada

³ Wawancara dengan Pemilik Lahan, tanggal 20 Oktober 2011 jam 16.15 Wib.

saat akad.⁴ Sehingga kelemahan pada perjanjian kerjasama (kontrak) yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada kontrak tersebut yang menyusahkan/ merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden⁵, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, yaitu sebanyak 9 orang atau 21% responden mengatakan penting karena menurut mereka dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, menurut 21 orang atau 79% responden yang mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.

Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *syirkatul-mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengusaha atau pekerja, sehingga keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

⁴ Wawancara dengan Bang Wawan (pekerja) di tepian sungai saat mau mandi, pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 17.30 Wib

⁵ Wawancara, tanggal 20 Oktober 2011 di Desa Pintu Gobang Kari jam 10.00 Wib

Dalam kasus ini, pemilik lahan bertindak sebagai pemilik modal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja.

Pada penelitian ini, populasi berjumlah sebanyak 30 orang dan itu juga menjadi sampel. Dari hasil observasi penulis di laparang,⁶ seluruh sampel tersebut terdiri dalam 5 kelompok, pada setiap kelompok beranggotakan 6 orang (1 pemilik lahan dan 5 pekerja). Adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

1. Bentuk perjanjian pertama;

Pemilik lahan bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan penambang batu dan pasir hanya sebagai pekerja.⁷

2. Bentuk perjanjian kedua;

Bentuk perjanjian ini merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama, yaitu pemilik lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pekerja

⁶ *Observasi*, tanggal 22 Oktober 2011 pada saat mereka kerja.

⁷ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

menanggung semua biaya kerusakan alat, dan pemilik lahan hanya sebagai pemodal saja.⁸

Jadi, bila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

B. Aplikasi Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Berbicara tentang aplikasi akad kerjasama antara penambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada dua bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas pada poin A, hal ini tentu berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan.

Pada bentuk akad yang *pertama*, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu 60% dari total hasil per-bulan untuk pemilik lahan, dan 40% untuk pekerja, dengan catatan bahwa dalam 60% tersebut termasuk biaya perbaikan alat. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

⁸ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

Pada saat akad, pemilik lahan bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi berdua 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan penambang batu dan pasir hanya sebagai pekerja.⁹ Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun, aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pekerja/ penambang, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik modal/ lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung pekerja mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu.¹⁰

Menurut hasil wawancara penulis dengan pekerja¹¹, pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap akhir bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyariah merasa rugi, yaitu pekerja. Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplen kepada si pemilik lahan justru mereka tidak di grubris oleh pemilik lahan, apalagi yang membuat pekerja makin terpuruk

⁹ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

¹⁰ Kemi, penambang batu dan pasir, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2011 jam 13.30 Wib.

¹¹ *Wawancara*, tanggal 22 Oktober 2011 jam 10.30 Wib.

yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas atau diakui oleh notaris.

Sistem kerjasama bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penambang batu dan pasir, pihak penambang merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (pihak pekerja) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekerja tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik lahan bertindak leluasa kepada pihak pekerja.

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang *kedua* akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pekerja menanggung semua biaya kerusakan alat, dan pemilik lahan hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden,¹² bahwa pembagian keuntungannya juga sama pada setiap akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pekerja selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan

¹² Wawancara dengan pekerja pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 12.00 Wib saat rehat kerja.

keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan alat-alat, maka pihak pekerja selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik lahan.

Pada kasus ini, 60% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pekerja adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara otomatis akan berkurang dari bagian yang semestinya. Menurut pekerja¹³, dalam pembagian keuntungan ini sudah berbentuk bagi 3, yaitu 40% untuk pemilik lahan, 30% untuk pekerja dan ada 30% untuk keperluan lain, yaitu biaya-biaya operasional. Sementara itu, pemilik lahan tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 40% dari dari biaya keseluruhan. Hal ini tentunya tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penambang batu dan pasir adalah akad kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati di awal.

¹³ Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 12.00 Wib

C. Analisa Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Mengenai Akad Perjanjian Kerjasama Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Syirkah atau musyarakah (kerjasama) berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fiqih, syirkah adalah suatu akad antar dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Menurut Chairuman¹⁴ syirkah (kerjasama) pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain kerjasama ini mencari keuntungan.

Berdasarkan pendapat di atas, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan semata-mata kerjasama mencari keuntungan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pengusaha tambang batu dan pasir. Karena bagi hasil yang disepakati 40% untuk pengusaha tambang batu dan pasir dan 60% untuk pemilik lahan dari perolehan hasil per bulan. Kenyataan di lapangan bahwa pekerja yang menanggung biaya operasionalnya.

Muamalah di atas termasuk syirkah mudharabah yang tidak sah (fasid) karena dua alasan berikut ini:

1. Dalam akadnya sudah ditentukan lebih dulu jumlah nominal tertentu yang akan diperoleh pengusaha sebagai keuntungannya (yakni jumlah hasil

¹⁴ Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

perbulan). Ini tidak dibenarkan dalam hukum mudharabah, karena penentuan besarnya keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah (persentase) tertentu, misalnya 50% untuk investor dan 50% untuk pengelola modal (perusahaan) dan bukan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu.

2. Terjadi kesalahan dalam penentuan persentase bagi hasil dalam muamalah di atas, yaitu penentuan besarnya bagi hasil didasarkan pada persentase modal (kapital), yaitu sebesar 60% dari modal. Padahal yang benar dalam hukum mudharabah, besarnya bagi hasil adalah persentase dari hasil (laba/profit), bukan persentase dari modal.

Karena itu, muamalah di atas menurut syaria Islam adalah tidak sah. Dalam istilah fiqih dan ushul fiqih, akad muamalah di atas disebut fasid (rusak), yakni terjadi kekeliruan dalam hal-hal yang tidak termasuk rukun-rukun akad (rukun akad ada tiga; dua pihak yang berakad, objek akad, dan ijab-kabul). Akad fasid itu masih dapat diperbaiki atau diteruskan jika telah dilakukan koreksi atas kesalahan yang ada¹⁵. Menyangkut dengan masalah perjanjian Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Surat al-Maidah ayat 1, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".¹⁶
(Q.S al-Maidah: 1).

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, III/225-228

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamsil Cipta Media, 2006), h. 106.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi.¹⁷

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah: **Pertama**, tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariat, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariat adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariat, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Kedua, harus sama ridha dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.¹⁸ Dalam hal ini, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu pada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak

¹⁷ Chairuman, Suhrawadi, *Op.cit*, h. 2

¹⁸ *Ibid*.

mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada pelaksanaan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁹

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid²⁰

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57) 4 :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"²¹. (Q.S. al-Hadid: 4)

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.²²

2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".²³ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada hadits berikut ini:²⁴

Hadis riwayat al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".²⁵

²¹ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 538.

²² M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1., h. 125-126.

²³ Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001., h. 78-79.

²⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 1. h. 11. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

²⁵ *Ibid.*

3. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ص

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".²⁶ (Q.S. al-Hadid: 25)

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ^ج

Artinya: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil".²⁷ (Q.S al-'Araf: 29)

Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.²⁸

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 541.

²⁷ *Ibid*, h. 153 .

²⁸ Gemala Dewi (2006), *Hukum Perikatan ...*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS. al-Hujurat (49): 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"²⁹ (Q.S. al-Hujarat: 13)

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³⁰ QS.al- Ahzab (33): 70

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"³¹ (Q.S. al-Ahzab: 70)

6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 517.

³⁰ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37.

³¹ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 427.

persengketaan.³² Dalam Q.S. al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.³³

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain.

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditaqdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu Pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing.

³² Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

³³ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37-38.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³⁴. (Q.S. al-Baqarah: 282)

Pada ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo.

Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 48.

bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut?.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

1. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)³⁵

Adapun aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada lanjutan Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: ”Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.³⁶ (Q.S. al-Baqarah: 282)

³⁵ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

³⁶ Departemen Agama RI, *Loc. cit*.

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu* pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “menulis perjanjian” seperti dikemukakan DR. M. Quraish Shihab adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur'an (2004), Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuat perjanjian.

Sementara itu, Gemala Dewi SH, LLM, di dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia

(2004) mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah “asas tertulis” atau al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan Drs. Ikhwan Hamdani MAg di dalam Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Islam (2003) menyatakan bahwa salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat “perjanjian tertulis” di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282. Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penfsiran Al-Qur'an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat “perjanjian tertulis”.

Dengan merujuk kepada KUH Perdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

2. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)³⁷

³⁷ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 33.

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah al-Baqarah 282 dapat diketahui dari lanjutan ayat tersebut, sebagai berikut:

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sebagai contoh, pedagang atau pemilik toko pada umumnya mempunyai mitra dagang yang berfungsi sebagai pemasok barang. Pelunasan kepada pemasok ini biasanya dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur, sehingga saldo utang si pedagang berubah dari waktu ke waktu. Dengan pembukuan yang akurat, maka perubahan saldo utang tetap terpantau sebagaimana mestinya.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari.

Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggung-jawabkan.

- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya, bahkan bisa dibaca serta dipelajari isinya, pada akhirnya dapat menghilangkan perasaan ragu terhadap ada tidaknya utang piutang itu, berikut posisi saldonya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha Tambang Batu dan Pasir adalah sebagai berikut:

Bahwasanya akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan adalah akad kerjasama bagi hasil atau mudharabah dalam keuntungan. Namun, dalam pengaplikasiannya di lapangan tidaklah sesuai dengan perjanjian pada awal akad. Di sisi lain, perjanjian ini tidaklah

tertulis dalam bentuk akta notaris, sehingga perjanjian ini lemah dari segi kekuatan hukumnya.

Sementara itu, bentuk perjanjian yang mereka laksanakan tidak syah (fasid) karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai, hal ini dapat dikaji pada lanjutan Surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S al-Baqarah: 282)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan seseorang adalah *syarikah mudharabah* (bagi hasil), yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerjasama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skil (keterampilan) dipadukan menjadi satu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden¹, maka dapat diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pengusaha Tambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau perjanjian tertulis.

Sementara itu, dari hasil wawanca penulis² dengan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 21 orang atau 79% menyatakan kerjasama dalam usaha tambang batu dan pasir ini sudah bejalan \pm 11 tahun yaitu sejak tahun 2000 sampai sekarang. Sedangkan menurut 3 Orang atau 7% renponden

¹ Wawancara dengan Pemilik Lahan, tanggal 20 Oktober 2011 jam 16.15 Wib.

² Wawancara tanggal 02 November 2011 di Desa Pintu Gobang Kari jam 10.00 Wib.

mengatakan usaha ini telah berjalan selama 8 tahun, dan menurut 6 orang yang lain atau 14% mengatakan usaha ini telah berjalan selama 6 tahun, hal ini dikarenakan responden tersebut baru bekerja selama \pm 6 tahun.

Pada dasarnya prinsip dan hikmah dari sebuah kerjasama adalah saling tolong-menolong, yaitu ketika seorang pemilik harta tidak bisa mengalokasikan dana yang ia punya dikarenakan oleh suatu hal, sehingga bisa dikembangkan oleh seorang pekerja, hal itu juga sangat membantu bagi pekerja yang tidak mempunyai modal, dengan modal yang diberikan oleh seseorang kepada si pekerja bisa dikelola dan dimanfaatkan agar mendapatkan hasil dan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara³, alasan responden mengadakan perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau tertulis hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Sehingga dapat diketahui bahwa alasan perjanjian ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan menurut pemilik lahan.

Walaupun perjanjian kerjasama (kontrak) sudah disepakati, namun sering terjadi wanprestasi-wanprestasi yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, hal ini sesuai dengan pengakuan salah seorang responden kepada penulis pada saat wawancara, dia mengatakan bahwa pemilik lahan tidak mengakui dan menjalankan sesuai dengan janji yang telah disepakasi pada

³ Wawancara dengan Pemilik Lahan, tanggal 20 Oktober 2011 jam 16.15 Wib.

saat akad.⁴ Sehingga kelemahan pada perjanjian kerjasama (kontrak) yang tidak tertulis ini adalah tidak adanya kekuatan hukum pada kontrak tersebut yang menyusahkan/ merugikan salah satu pihak. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden⁵, dapat diketahui pendapat responden tentang ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis, yaitu sebanyak 9 orang atau 21% responden mengatakan penting karena menurut mereka dari sanalah perjanjian dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Namun, menurut 21 orang atau 79% responden yang mengatakan tidak penting karena beralasan jika perjanjian ini dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis akan merugikan kedua belah pihak, misalnya ada beberapa kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan juga maka harus diadakan perjanjian baru yang dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam perjanjian dengan alasan sifat manusia yang kurang puas.

Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini lebih erat kaitannya dengan *syirkatul-mudharabah*, yaitu kerjasama antara dua belah pihak di mana salah satunya menyerahkan atau menyediakan modal berupa lahan dan peralatan kerja, dan pihak lainnya bertindak sebagai pengusaha atau pekerja, sehingga keuntungan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal akad.

⁴ Wawancara dengan Bang Wawan (pekerja) di tepian sungai saat mau mandi, pada tanggal 21 Oktober 2011 jam 17.30 Wib

⁵ Wawancara, tanggal 20 Oktober 2011 di Desa Pintu Gobang Kari jam 10.00 Wib

Dalam kasus ini, pemilik lahan bertindak sebagai pemilik modal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja.

Pada penelitian ini, populasi berjumlah sebanyak 30 orang dan itu juga menjadi sampel. Dari hasil observasi penulis di laparang,⁶ seluruh sampel tersebut terdiri dalam 5 kelompok, pada setiap kelompok beranggotakan 6 orang (1 pemilik lahan dan 5 pekerja). Adapun bentuk akad perjanjian yang mereka sepakati terdiri pada dua bentuk kesepakatan, yaitu:

1. Bentuk perjanjian pertama;

Pemilik lahan bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan penambang batu dan pasir hanya sebagai pekerja.⁷

2. Bentuk perjanjian kedua;

Bentuk perjanjian ini merupakan kebalikan dari bentuk yang pertama, yaitu pemilik lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pekerja

⁶ *Observasi*, tanggal 22 Oktober 2011 pada saat mereka kerja.

⁷ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

menanggung semua biaya kerusakan alat, dan pemilik lahan hanya sebagai pemodal saja.⁸

Jadi, bila dilihat dari kedua bentuk akad di atas, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah, hanya saja akad kerjasama tersebut tidak tertuangkan dalam bentuk sebuah perjanjian tertulis yaitu perjanjian dimulut saja, sehingga akad perjanjian tersebut mempunyai kelemahan dari segi kekuatan hukum.

B. Aplikasi Akad Kerjasama antara Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Berbicara tentang aplikasi akad kerjasama antara penambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, penulis akan memfokuskan pembahasan ini pada dua bentuk perjanjian yang telah dipaparkan di atas pada poin A, hal ini tentu berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan.

Pada bentuk akad yang *pertama*, kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu 60% dari total hasil per-bulan untuk pemilik lahan, dan 40% untuk pekerja, dengan catatan bahwa dalam 60% tersebut termasuk biaya perbaikan alat. Berikut ini, akan digambarkan pendapat responden mengenai perjanjian kerjasama tanpa ikatan tertulis.

⁸ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

Pada saat akad, pemilik lahan bertindak sebagai pemodal yaitu menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi berdua 60% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan penambang batu dan pasir hanya sebagai pekerja.⁹ Jadi, kalau dilihat dari awal akad, kerjasama yang terjadi tidaklah salah, bahkan juga dari segi pembagian keuntungan juga sudah adil dan sah.

Namun, aplikasi dan kenyataan yang terjadi dari akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya perbaikan dan mengganti alat ditanggung oleh pekerja/ penambang, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, pemilik modal/ lahan tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung pekerja mengalami kerugian baik dari segi pembagian keuntungan maupun rugi dari segi tenaga dan waktu.¹⁰

Menurut hasil wawancara penulis dengan pekerja¹¹, pembagian dari keuntungan dihitung pada setiap akhir bulan, pada pembagian keuntungan inilah salah satu dari dua orang yang bersyariah merasa rugi, yaitu pekerja. Menurut pengakuan pekerja kepada penulis, mereka tidak bisa bertindak apa-apa, sebab ketika mereka komplen kepada si pemilik lahan justru mereka tidak di grubris oleh pemilik lahan, apalagi yang membuat pekerja makin terpuruk

⁹ Darmawis, Pemilik Lahan/ Modal, *Wawancara*, tanggal 20 Oktober 2011 jam 13.00 Wib.

¹⁰ Kemi, penambang batu dan pasir, *Wawancara*, tanggal 21 Oktober 2011 jam 13.30 Wib.

¹¹ *Wawancara*, tanggal 22 Oktober 2011 jam 10.30 Wib.

yaitu perjanjian ini tidak tertulis dalam bentuk perjanjian atas kertas atau diakui oleh notaris.

Sistem kerjasama bagi hasil di atas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak penambang batu dan pasir, pihak penambang merasa rugi dari hasil kerjasama tersebut, sebab setelah dijalani mereka merasakan kerugian karena dalam pelaksanaannya ternyata mereka (pihak pekerja) yang mengeluarkan biaya untuk perbaikan alat, artinya tidak sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Ternyata yang lebih membuat pihak pekerja tidak bisa berbuat apa-apa yaitu perjanjian tersebut tidak tertulis dan tidak ada saksi, sehingga pihak pemilik lahan bertindak leluasa kepada pihak pekerja.

Sementara itu, pada bentuk perjanjian yang *kedua* akad ini merupakan kebalikan dari bentuk perjanjian yang pertama, yaitu pemilik lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, yang mana keuntungan dibagi dua 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pekerja menanggung semua biaya kerusakan alat, dan pemilik lahan hanya sebagai pemodal saja.

Menurut hasil wawancara penulis dengan responden,¹² bahwa pembagian keuntungannya juga sama pada setiap akhir bulan. Namun yang membuat tidak sesuai dengan akad pada awal perjanjian yaitu pada saat pembagian pekerja selalu ada mengalami kerugian setelah dikeluarkan

¹² Wawancara dengan pekerja pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 12.00 Wib saat rehat kerja.

keperluan sehari-hari, mulai dari biaya makan, obat-obatan dan kesejahteraan pekerja hingga biaya perbaikan alat-alat, maka pihak pekerja selalu mengeluh dengan hasil yang ia peroleh setelah dibagi dengan pemilik lahan.

Pada kasus ini, 60% dari jumlah keseluruhan yang akan dibagikan kepada pekerja adalah jumlah kotor, belum dikeluarkan biaya-biaya keseluruhan, sehingga setelah dikeluarkan biaya-biaya tersebut secara otomatis akan berkurang dari bagian yang semestinya. Menurut pekerja¹³, dalam pembagian keuntungan ini sudah berbentuk bagi 3, yaitu 40% untuk pemilik lahan, 30% untuk pekerja dan ada 30% untuk keperluan lain, yaitu biaya-biaya operasional. Sementara itu, pemilik lahan tidak mau tau dengan biaya-biaya tersebut, dia hanya tau bagiannya adalah 40% dari dari biaya keseluruhan. Hal ini tentunya tidak adil dan tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad.

Setelah melihat kenyataan di atas, dan dari hasil wawancara penulis dengan responden, maka dapat penulis simpulkan bahwa akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penambang batu dan pasir adalah akad kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) dari keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati di awal.

¹³ Wawancara, pada tanggal 24 Oktober 2011 jam 12.00 Wib

C. Analisa Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Mengenai Akad Perjanjian Kerjasama Penambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan

Syirkah atau musyarakah (kerjasama) berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam istilah fiqih, syirkah adalah suatu akad antar dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Menurut Chairuman¹⁴ syirkah (kerjasama) pada dasarnya merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu usaha, yang mana modal usaha itu adalah merupakan modal bersama melalui penyertaan modal oleh masing-masing pihak, dengan kata lain kerjasama ini mencari keuntungan.

Berdasarkan pendapat di atas, pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan semata-mata kerjasama mencari keuntungan, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pengusaha tambang batu dan pasir. Karena bagi hasil yang disepakati 40% untuk pengusaha tambang batu dan pasir dan 60% untuk pemilik lahan dari perolehan hasil per bulan. Kenyataan di lapangan bahwa pekerja yang menanggung biaya operasionalnya.

Muamalah di atas termasuk syirkah mudharabah yang tidak sah (fasid) karena dua alasan berikut ini:

1. Dalam akadnya sudah ditentukan lebih dulu jumlah nominal tertentu yang akan diperoleh pengusaha sebagai keuntungannya (yakni jumlah hasil

¹⁴ Chairuman, Suhrawadi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75.

perbulan). Ini tidak dibenarkan dalam hukum mudharabah, karena penentuan besarnya keuntungan harus dinyatakan dalam nisbah (persentase) tertentu, misalnya 50% untuk investor dan 50% untuk pengelola modal (perusahaan) dan bukan dinyatakan dalam jumlah nominal tertentu.

2. Terjadi kesalahan dalam penentuan persentase bagi hasil dalam muamalah di atas, yaitu penentuan besarnya bagi hasil didasarkan pada persentase modal (kapital), yaitu sebesar 60% dari modal. Padahal yang benar dalam hukum mudharabah, besarnya bagi hasil adalah persentase dari hasil (laba/profit), bukan persentase dari modal.

Karena itu, muamalah di atas menurut syaria Islam adalah tidak sah. Dalam istilah fiqih dan ushul fiqih, akad muamalah di atas disebut fasid (rusak), yakni terjadi kekeliruan dalam hal-hal yang tidak termasuk rukun-rukun akad (rukun akad ada tiga; dua pihak yang berakad, objek akad, dan ijab-kabul). Akad fasid itu masih dapat diperbaiki atau diteruskan jika telah dilakukan koreksi atas kesalahan yang ada¹⁵. Menyangkut dengan masalah perjanjian Allah SWT telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Surat al-Maidah ayat 1, yaitu:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".¹⁶
(Q.S al-Maidah: 1).

¹⁵ Taqiyuddin an-Nabhani, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, III/225-228

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamsil Cipta Media, 2006), h. 106.

Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Dari ketentuan di atas dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, dan apabila seseorang itu telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sanksi.¹⁷

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah: **Pertama**, tidak menyalahi hukum syariat yang disepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariat, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariat adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariat, maka perjanjian diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Kedua, harus sama ridha dan ada pilihan. Maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela akan isi perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.¹⁸ Dalam hal ini, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu pada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak

¹⁷ Chairuman, Suhrawadi, *Op.cit*, h. 2

¹⁸ *Ibid.*

mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Ketiga, harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari. Dengan demikian pada pelaksanaan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.¹⁹

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah :

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid²⁰

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam QS. al-Hadid (57) 4 :

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhammad Syakir Aula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 723-727.

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan"²¹. (Q.S. al-Hadid: 4)

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Akibat dari penerapan asas ini, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya karena segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala.²²

2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Terdapat kaidah fiqhiyah yang artinya, "Pada dasarnya segala sesuatu itu dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang".²³ Kaidah fiqih tersebut bersumber pada hadits berikut ini:²⁴

Hadis riwayat al-Bazar dan at-Thabrani yang artinya:

"Apa-apa yang dihalalkan Allah adalah halal, dan apa-apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa-apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemaaf-Nya. Sungguh Allah itu tidak melupakan sesuatupun".²⁵

²¹ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 538.

²² M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. 1., h. 125-126.

²³ Yeni Salma Barlinti, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001., h. 78-79.

²⁴ Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), cet. 1. h. 11. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

²⁵ *Ibid.*

3. Asas Keadilan (Al ‘Adalah)

Dalam QS. Al-Hadid (57): 25 disebutkan bahwa Allah berfirman :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ص

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan".²⁶ (Q.S. al-Hadid: 25)

Selain itu disebutkan pula dalam QS. Al A'raf (7): 29

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ^ج

Artinya: "Tuhanku menyuruh supaya berlaku adil".²⁷ (Q.S al-'Araf: 29)

Pada asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.²⁸

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Hubungan mu'amalah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain, hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 541.

²⁷ *Ibid*, h. 153 .

²⁸ Gemala Dewi (2006), *Hukum Perikatan ...*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar (2006), *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras. Dalam QS. al-Hujurat (49): 13

يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

Artinya: "Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"²⁹ (Q.S. al-Hujarat: 13)

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.³⁰ QS.al- Ahzab (33): 70

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar"³¹ (Q.S. al-Ahzab: 70)

6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 517.

³⁰ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37.

³¹ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 427.

persengketaan.³² Dalam Q.S. al-Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.³³

Berdasarkan azas hukum kontrak yang telah penulis paparkan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan tidak sesuai yaitu salah satu perjanjian yang mereka laksanakan tidak tertulis, dan di khawatirkan akan melanggar azas-azas yang lain.

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditaqdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu Pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing.

³² Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), h. 124.

³³ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 37-38.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian tertulis dan pembukuan yang tertib dalam masalah perjanjian, ternyata bukan monopoli hukum semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”³⁴. (Q.S. al-Baqarah: 282)

Pada ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo.

Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan “menulis” pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. *Pertama*, ungkapan “menulis” dapat diartikan sebagai perintah melakukan “pencatatan transaksi” yang nota bene merupakan

³⁴ Departemen Agama RI, *Op. cit*, h. 48.

bagian dari akuntansi. *Kedua*, ungkapan “menulis” dapat pula diartikan sebagai perintah membuat “perjanjian tertulis” yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu “perjanjian tertulis” dan “pencatatan transaksi”, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut?.

Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

1. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)³⁵

Adapun aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada lanjutan Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

Artinya: ”Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”.³⁶ (Q.S. al-Baqarah: 282)

³⁵ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 33. Lihat juga Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam ...*, h. 12.

³⁶ Departemen Agama RI, *Loc. cit*.

DR. M. Quraish Shihab pada Tafsir Al-Misbah, Volume I (2000) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata *adil* dan *di antara kamu* pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “menulis perjanjian” seperti dikemukakan DR. M. Quraish Shihab adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur'an (2004), Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuat perjanjian.

Sementara itu, Gemala Dewi SH, LLM, di dalam bukunya Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia

(2004) mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah “asas tertulis” atau al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan Drs. Ikhwan Hamdani MAg di dalam Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) Dalam Perspektif Islam (2003) menyatakan bahwa salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat “perjanjian tertulis” di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282. Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penfsiran Al-Qur'an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat “perjanjian tertulis”.

Dengan merujuk kepada KUH Perdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

2. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)³⁷

³⁷ Gemala Dewi, *Op.cit*, h. 33.

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah al-Baqarah 282 dapat diketahui dari lanjutan ayat tersebut, sebagai berikut:

وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ
عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Artinya: “Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “menulis hutang tanpa jemu-jemunya” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sebagai contoh, pedagang atau pemilik toko pada umumnya mempunyai mitra dagang yang berfungsi sebagai pemasok barang. Pelunasan kepada pemasok ini biasanya dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur, sehingga saldo utang si pedagang berubah dari waktu ke waktu. Dengan pembukuan yang akurat, maka perubahan saldo utang tetap terpantau sebagaimana mestinya.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu :

- a. “Lebih adil di sisi Allah”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan pada kedua pihak dapat dihindari.

Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggung-jawabkan.

- b. “Lebih dapat menguatkan persaksian”. Mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat.
- c. “Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu”. Bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya, bahkan bisa dibaca serta dipelajari isinya, pada akhirnya dapat menghilangkan perasaan ragu terhadap ada tidaknya utang piutang itu, berikut posisi saldonya.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab ini, maka dapat ditarik kesimpulan bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama antara pengusaha Tambang Batu dan Pasir adalah sebagai berikut:

Bahwasanya akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan adalah akad kerjasama bagi hasil atau mudharabah dalam keuntungan. Namun, dalam pengaplikasiannya di lapangan tidaklah sesuai dengan perjanjian pada awal akad. Di sisi lain, perjanjian ini tidaklah

tertulis dalam bentuk akta notaris, sehingga perjanjian ini lemah dari segi kekuatan hukumnya.

Sementara itu, bentuk perjanjian yang mereka laksanakan tidak syah (fasid) karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai, hal ini dapat dikaji pada lanjutan Surah al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: "Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya". (Q.S al-Baqarah: 282)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai kajian tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ tanah Desa Pintu Gobang Kari serta analisa fiqih muamalah tentang perjanjian tersebut. Maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pengusaha Tambang Batu dan Pasir dengan Pemilik Lahan ialah perjanjian kerjasama tanpa ikatan atau perjanjian tidak tertulis. Akad kerjasama yang terjadi dalam kasus ini adalah akad *syirkatul-mudharabah* (bagi hasil) yang dilandasi oleh rasa tolong- menolong dan saling percaya. Akad kerjasama ini ada dua bentuk kesepakatan, yaitu:
 - a. Pemilik lahan bertindak sebagai pemodal/ lahan sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, keuntungan dibagi dua 60% untuk pemilik modal/ lahan dan 40% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pemilik modal menanggung semua biaya kerusakan alat, dan penambang batu dan pasir hanya sebagai pekerja.
 - b. Pemilik lahan bertindak sebagai pemodal menyediakan lahan dan alat, sedangkan penambang batu dan pasir bertindak sebagai pekerja, keuntungan dibagi dua 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk penambang batu dan pasir, dengan catatan bahwa pekerja menanggung

semua biaya kerusakan alat, dan pemilik lahan hanya sebagai pemodal saja.

2. Diketahui bahwa akad kerjasama antara pemilik lahan dengan penambang batu dan pasir adalah akad kerjasama bagi hasil (*mudharabah*) pada keuntungan. Namun, dalam aplikasinya akad ini tidak sesuai dengan perjanjian pada awal akad, yaitu tidak sesuai pada nisbah pembagian yang telah disepakati di awal.
3. Diketahui bahwasanya akad kerjasama antara pengusaha tambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ modal adalah akad kerjasama bagi hasil atau *mudharabah* dalam keuntungan. Menurut syaria Islam bahwa aplikasi dari perjanjian yang mereka laksanakan tidaklah syah (*fasid*) karena menurut aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai. Dalam istilah fiqh dan ushul fiqh, akad muamalah di atas disebut fasid (rusak), yakni terjadi kekeliruan dalam hal-hal yang tidak termasuk rukun-rukun akad (*dua pihak yang berakad, objek akad, dan ijab-kabul*). Akad fasid itu masih dapat diperbaiki atau diteruskan jika telah dilakukan koreksi atas kesalahan yang ada.

B. SARAN

Setelah penulis meneliti tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara penambang batu dan pasir dengan pemilik lahan/ tanah Desa Pintu Gobang Kari, maka penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam hendaknya dalam melakukan kerjasama dilandasi dengan iman dan dalam pengaplikasiannya haruslah jujur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Karena sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah SWT sebaiknya kita melakukan kegiatan muamalah tersebut dikendalikan dengan iman, takwa dan istiqomah, karena sesungguhnya iman, takwa dan istiqomah merupakan pencapaian kegiatan muamalah yang lebih baik.
2. Kepada para pemilik lahan atau modal hendaklah memiliki rasa tanggung jawab, berlaku adil dan terbuka kepada mitra kerjanya, serta menepati perjanjian yang telah disepakati. Hendaklah membagi keuntungan sesuai dengan masing-masing dan tetap pada akad yang telah disepakati di awal.
3. Kepada kedua belah pihak (penambang batu/ pasir dan pemilik modal) hendaknya melakukan akad kerjasama yang sesuai dengan ketentuan Islam (fiqih muamalah) dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan ataupun yang merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Al-Fath, *Kitab Al-Mu'amalat fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qawanin Al-Misriyyah*, Mesir: Mathba'ah Al-Busfur, 1913.
- Al-Fauzan, Saleh, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- an-Nabhani, Taqiyuddin, *An-Nizham al-Iqtishadi*, Cetakan ke-4, Beirut: Darul Ummah, 1990.
- _____, *asy-Syakhshiyah al-Islamiyah*, III/225-228
- Asy-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1964.
- Ayyub, Hasan, *Fiqhu al-Mu'amalati al-Maaliati fi al-Islami*, Cet. 3., Mesir: Daar as-Salam, 2006.
- Barlinti, Yeni Salma, *Prinsip-prinsip Hukum Perdagangan Berdasarkan Ketentuan World Trade Organization dalam Perspektif Hukum Islam*, tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: 2001.
- Bayles, Michael D, *Principles of Law A Normatif Analysis*, Holland: Riding Publishing Company Dordrecht, 1987.
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, , cetakan ke-8. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Syamsil Cipta Media, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fauzan, DR. Sholeh bin bin Abdullah al-Fauzan, *al-Mulakhashu al-Fiqhiyyu*, Cetakan ke-1, jild 2, Riyadh: Kerajaan Saudi Arabiyah, 1423 H.
- Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*, cet. 1., Jakarta: Prenada Media, 2004.

_____, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Ed. 1., Cet. 2., Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

[http:// hbis.wordpress.com/2007/11/23/hukum-islam-tentang-muamalah/](http://hbis.wordpress.com/2007/11/23/hukum-islam-tentang-muamalah/)

<http://www.koperasisyariah.com/defenisi-musyarakah/>

Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, data yang diakses dari internet
<http://www.pkesinteraktif.com/content/view/4172/36/lang>

Jaffar Hafsah, Mohammad, *Kemitraan Usaha: Konsepsi dan Strategi*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah*, Alih Bahasa: Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Naufa, Ahmad, <http://ahmadnaufa.wordpress.com/2010/04/16/konsep-syirkah/>

Nurrahman Blog, *Macam-macam Srirkah*, (2010: Google.co.id)

Rahmat, Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Salim H.S, *Hukum Kontrak; Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Edisi 1-3, Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 2007.

Suhrawadi, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Syakir Aula, Muhammad, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

_____, Muhammad, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.

Syarifuddin, Prof. Dr. Amir, *Garis-garis Besar Fiqih*, Cet. 1, Edisi pertama, Bogor: Kencana, 2003.

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cetakan ke-2,
Bogor: Al-Azhar Press, 2011.